

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digital yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara masif saat ini pada akhirnya menimbulkan perubahan terhadap aktivitas kehidupan masyarakat dan tatanan organisasi dalam berbagai sektor, salah satunya organisasi pemerintah. Teknologi informasi digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi warga negaranya (Nainggolan & Yuwono, 2019). Sebagaimana disebutkan oleh Yunis et al. (2017) bahwa pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi *driver* utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Johnston (2006) menyebutkan bahwa adanya *good governance* ditandai dengan peningkatan kinerja melalui terciptanya akuntabilitas serta transparansi instansi, proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan lebih meningkatkan pelayanan kepada publik. Banyak pemerintah di berbagai negara telah menyadari pentingnya menggunakan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja, kualitas pelayanan publik, dan transparansinya dalam hal ini *good governance* (Yimer, 2015).

Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan di Indonesia disebut sebagai *e-government*. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Curtin et al., 2003). Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perpres tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang

mengatur mengenai pengintegrasian seluruh sistem informasi Pemerintah Daerah. Regulasi-regulasi ini pada intinya untuk mencapai tujuan yang sama yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih berkualitas, inovatif, dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan teknologi informasi pada organisasi pemerintah di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari semakin berkembangnya bentuk implementasi dari aplikasi *e-government* di antaranya *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalog*, *e-payment*, *e-controlling*, *e-health*, *e-planing*, *e-accounting*, dan lain lain. Aplikasi sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas *e-government* sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam berbagai bidang dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel serta masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan (Sita, 2018).

E-Budgeting merupakan salah satu aplikasi *e-government* yang banyak diimplementasikan organisasi pemerintah di Indonesia. *E-Budgeting* merupakan aplikasi penunjang personel atau aparatur pemerintah untuk mengakses serta memasukkan data-data penganggaran melalui internet (Beckett-Camaratta, 2002). Hernita (2018) menyebutkan *e-budgeting* mengambil peran penting aktivitas aparatur dalam hal perencanaan atau penyusunan sistem penganggaran pemerintah pada serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi. Aparatur mendapatkan kemudahan saat melakukan pekerjaannya terutama dalam hal penganggaran melalui perangkat-perangkat canggih pada instansi pemerintahan. *E-Budgeting* mengurangi beban pekerjaan aparatur sehingga mendukung aktivitasnya untuk memberikan *output* yang bermanfaat bagi organisasi, terutama dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi sistem penganggaran serta pelayanan publik. Maka dari itu, semakin optimalnya penerapan dari sistem *e-budgeting* maka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, kualitas, dan pengawasan kinerja aparat, dengan memperoleh manfaat antara lain proses transaksi dan penyajian laporan lebih cepat, memiliki keakuratan dalam

perhitungan, dapat menyimpan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan lebih rendah, dan informasi keuangan akan lebih relevan, transparan, cepat, akurat, lengkap, serta dapat diuji kebenarannya.

Penelitian yang menghubungkan TI dan kinerja organisasi telah banyak dilakukan, seperti penelitian dari Yunis et al. (2018) yang meneliti pengaruh penggunaan aplikasi berbasis TIK terhadap kinerja organisasi. Kobelsky et al. (2014) juga meneliti hubungan antara penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dengan kinerja organisasi sektor pendidikan. Selain itu Nasir dan Oktari (2011) juga meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian-penelitian tersebut inkonsisten. Hasil penelitian dari Yunis et al. (2018) dan Kobelsky et al. (2014) menemukan hubungan positif antara penggunaan teknologi informasi dengan kinerja organisasi. Berbeda dengan hasil penelitian dari Nasir dan Oktari (2011) yang menunjukkan hubungan negatif bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Penelitian yang menghubungkan teknologi informasi dengan kinerja personel belum banyak dilakukan. Iftiyani dan Rumpak (2019) meneliti pengaruh teknologi *smart city* terhadap kinerja aparatur pemerintah dan menemukan hasil korelasi yang positif dan baik. Dengan demikian terdapat peluang untuk meneliti pengaruh *e-budgeting* terhadap kinerja aparatur pemerintah. Penelitian yang mengaitkan *e-budgeting* sebagai salah satu implementasi TI di pemerintah dan kinerja aparatur belum banyak dilakukan. Winata dan Mia (2005) pernah meneliti pengaruh penggunaan teknologi informasi dalam partisipasi anggaran terhadap kinerja manajer hotel dan hasilnya menunjukkan hubungan yang positif.

Implementasi *e-budgeting* di pemerintahan membutuhkan sumber daya aparatur yang kompeten. Sebagaimana yang disebutkan oleh Scavalluzzo dan Ittner (2004) bahwa implementasi sistem tidak akan sukses jika tidak dibersamai dengan perilaku individu (aparatur) yang mendukung implementasi sistem tersebut. Sebaik dan secanggih apapun sistem *e-budgeting* yang sudah dirancang, namun apabila pengguna tidak cukup kompeten dalam mengoperasikannya, tentu hal itu akan menjadi krusial. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem teknologi informasi berupa

aplikasi *e-budgeting* pada aktivitas pemerintahan yang begitu gencar saat ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan masalah, karena penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat berdampak pada kerugian finansial maupun non finansial (Hernita, 2018).

Teknologi informasi memiliki beberapa komponen, tiga di antaranya yang paling utama yaitu teknologi komputer, teknologi telekomunikasi, dan *content* informasi. Di antara ketiganya, teknologi komputer menjadi pendorong utama dalam perkembangan teknologi informasi (O'brien & Marakas, 2005). Penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat disebabkan karena adanya kecemasan saat apatur menggunakan teknologi komputer atau yang disebut dengan *computer anxiety*. *Computer anxiety* merupakan salah satu faktor personaliti yang dapat memengaruhi keahlian pemakai (*user*) dalam menggunakan komputer. Kompetensi aparatur terhadap penggunaan *e-budgeting* tidak akan maksimal jika ia memiliki kecenderungan *computer anxiety*. Semakin tinggi *computer anxiety* maka akan menurunkan tingkat keahlian pemakai dalam menggunakan komputer (Neill et al., 2004). Padahal dalam sistem *e-budgeting*, sudah menjadi hal yang pasti apabila aparatur membutuhkan perangkat komputer dalam penggunaannya. Jika aparatur tersebut memiliki kecenderungan *computer anxiety* maka dikhawatirkan akan berdampak pada kinerjanya.

Pengaruh *e-budgeting* terhadap kinerja aparatur dapat dijelaskan oleh teori *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM menyebutkan keinginan perilaku individu dalam menggunakan suatu sistem ditentukan dari dua persepsi, antara lain *perceived usefulness* yaitu seseorang merasa yakin bahwa dengan menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya dan *perceived ease of use* yaitu seseorang merasa yakin bahwa tidak perlu upaya yang tinggi untuk dapat menggunakan suatu sistem. Implikasi teori TAM pada penelitian ini yaitu aparatur akan merasa yakin bahwa dengan menggunakan *e-budgeting* dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya dan tidak memerlukan upaya yang tinggi untuk dapat menggunakan sistem tersebut apabila *computer anxiety* yang dimiliki aparatur rendah.

Penelitian ini akan mengambil subjek penelitian di Pemerintah Kota Surabaya. Alasan memilih di Surabaya dikarenakan kota ini merupakan pelopor dalam penggunaan sistem *e-budgeting* (buku profil pemerintahan Kota Surabaya). Sistem ini pertama kali dirintis oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2003 dan diadopsi oleh pemerintah Jakarta pada tahun 2015 (*news.detik.com*, diakses pada 15 Februari 2020). Sebagai pelopor penggunaan sistem *e-budgeting*, Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2013 silam meraih dua penghargaan tingkat internasional di bidang *data center* dan inklusi digital pada ajang penghargaan *Future Government*. Selain penghargaan tersebut, beberapa tahun terakhir Kota Surabaya selalu mendapatkan penghargaan kota kekinian, di antaranya tahun 2018 dalam ajang *The Guangzhou International Award 2018* mendapatkan penghargaan sebagai *Online Popular City* dan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya meraih penghargaan sebagai kota terbaik dalam ajang *Innovative Government Award (IGA) 2017*. Berbagai penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Surabaya tersebut mencerminkan bahwa Kota Surabaya dapat dijadikan *role model* dalam penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan teori-teori serta praktik yang telah dijelaskan di atas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi *E-Budgeting* terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah dengan *Computer Anxiety* sebagai Variabel Moderasi”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis data yang dikumpulkan berupa kuesioner yang dibagikan kepada aparatur Pemerintah Kota Surabaya. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini diharapkan sesuai dengan pengembangan hipotesis yaitu *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah dan *computer anxiety* memoderasi pengaruh *e-budgeting* terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Secara akademis penelitian ini dapat berkontribusi dalam hal perluasan kajian pada khasanah ilmu Akuntansi, khususnya peran moderasi *computer anxiety* terhadap pengaruh *e-budgeting* pada sektor pemerintahan terhadap kinerja aparat. Selain itu, pemberian referensi peneliti di masa yang akan datang, khususnya penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian ini. Secara praktis,

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam hal pemberian rujukan bagi *decision makers* dalam mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan masalah *e-budgeting* dan pemberian informasi mengenai pengaruh *e-budgeting* terhadap kinerja aparatur pemerintah dengan *computer anxiety* sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini disajikan dalam lima bab. Bab 2 memuat konsep serta landasan teori yang relevan dengan faktor yang digunakan untuk mengurai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara ilmiah, penelitian terdahulu, dan jurnal ilmiah sebagai literatur pendukung dalam penelitian ini, seperti teori TAM (*Technology Acceptance Model*), kinerja aparatur, *e-budgeting*, dan *computer anxiety*. Bab 3 mengulas cara dan prosedur untuk menjawab permasalahan terkait pengaruh *e-budgeting* terhadap kinerja aparatur pemerintah dengan *computer anxiety* sebagai variabel moderasi; meliputi pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta teknik analisis. Bab 4 menguraikan pembahasan mengenai gambaran umum dan deskripsi hasil penelitian serta melaporkan hasil penelitian. Bab terakhir menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dengan hasil terjawabnya rumusan masalah yang diangkat berdasarkan metodologi penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, disertai pemberian saran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *e-budgeting* memengaruhi kinerja aparatur pemerintah?
2. Apakah *computer anxiety* memoderasi pengaruh *e-budgeting* terhadap kinerja aparatur pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris bahwa *computer anxiety* sebagai moderasi dari persepsi pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap kinerja aparatur pemerintah.